

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan non-program (non-program policy) dalam penyelenggaraan pelayanan penyeberangan Cilacap ke Kampunglaut merupakan respons adaptif yang muncul akibat keterbatasan kebijakan program formal dalam menghadapi dinamika implementasi di lapangan. Kondisi operasional yang ditandai oleh lonjakan penumpang, ketidakpastian cuaca, keterbatasan kapasitas layanan, serta dinamika sosial masyarakat pengguna jasa menunjukkan bahwa kebijakan program yang bersifat terencana dan standar belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas praktik pelayanan publik.

Penelitian ini membuktikan bahwa praktik diskresi aparatur, khususnya pengawas pelabuhan sebagai street-level bureaucrats, memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas operasional. Melalui penggunaan diskresi, kebijakan non-program diimplementasikan dalam bentuk penyesuaian operasional yang bersifat insidental, seperti penambahan trip penyeberangan, pengoperasian kapal cadangan, serta penyesuaian jam layanan. Praktik tersebut terbukti meningkatkan efektivitas layanan dan menjaga keberlangsungan pelayanan penyeberangan dalam situasi yang tidak terduga.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan non-program masih menghadapi permasalahan struktural, terutama pada aspek konsistensi prosedur, keselamatan pelayaran, dan akuntabilitas kebijakan. Ketiadaan pedoman tertulis dan mekanisme evaluasi yang sistematis menyebabkan kebijakan non-program berkembang sebagai praktik informal yang sangat bergantung pada pengalaman dan penilaian individual aparatur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas adaptif organisasi belum sepenuhnya terlembaga dalam kerangka kebijakan dan tata kelola pelayanan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan non-program bukan merupakan anomali kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari keterbatasan kebijakan program dalam menjangkau kompleksitas pelayanan publik di tingkat lapangan. Kebenaran hipotesis penelitian dapat diterima, bahwa efektivitas pelayanan penyeberangan Cilacap ke Kampunglaut sangat dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan non-program yang dijalankan melalui diskresi aparatur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka kebijakan adaptif yang mengintegrasikan praktik diskresi street-level bureaucracy ke dalam pedoman operasional yang formal, terstruktur, dan berorientasi pada keselamatan serta akuntabilitas pelayanan publik.

5.2 Implikasi.

5.2.1 Implikasi Kebijakan (Policy Implications).

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan dan pengembangan kebijakan pelayanan penyeberangan, khususnya dalam mengintegrasikan kebijakan non-program ke dalam kerangka kebijakan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-program telah menjadi instrumen utama dalam menjaga efektivitas layanan pada kondisi operasional yang tidak terduga. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu memberikan pengakuan formal terhadap praktik kebijakan adaptif yang selama ini dijalankan melalui diskresi aparatur lapangan.

Implikasi kebijakan yang utama adalah perlunya penyusunan pedoman operasional non-program policy yang secara eksplisit mengatur ruang diskresi pengawas pelabuhan. Pedoman tersebut perlu memuat batasan kewenangan, kriteria kondisi darurat atau insidental, serta prosedur pengambilan keputusan yang berorientasi pada keselamatan dan kepastian layanan. Dengan demikian, diskresi tidak lagi semata-mata bersifat individual, tetapi menjadi bagian dari mekanisme kebijakan yang terkontrol dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan pelayanan penyeberangan ke depan perlu mengadopsi prinsip kebijakan adaptif dengan memasukkan skema fleksibilitas operasional dalam dokumen kebijakan program. Integrasi ini memungkinkan kebijakan formal untuk lebih responsif terhadap ketidakpastian lingkungan, tanpa menghilangkan kepastian hukum dan standar keselamatan pelayaran.

5.2.2 Implikasi Manajerial dan Implementatif.

Dari perspektif implementasi kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas non-program policy sangat bergantung pada kapasitas adaptif organisasi dan kualitas aparatur pelaksana. Oleh karena itu, implikasi manajerial yang penting adalah perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengawas pelabuhan dan petugas operasional, melalui pelatihan yang berfokus pada pengambilan keputusan adaptif dan keselamatan pelayaran dalam situasi insidentil.

Selain penguatan SDM, implikasi implementatif lainnya adalah perlunya pengembangan sistem pelaporan dan dokumentasi kebijakan non-program. Setiap kebijakan insidentil yang diambil perlu dicatat secara sistematis sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran kebijakan (policy learning). Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai dasar perbaikan kebijakan program di masa mendatang.

Implikasi manajerial juga mencakup penguatan koordinasi internal dan lintas fungsi dalam organisasi. Pola komunikasi cepat yang selama ini berjalan secara informal perlu dilembagakan melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, sehingga keputusan non-program dapat diimplementasikan secara konsisten dan tidak bergantung pada individu tertentu.

5.2.3 Implikasi Teoretis.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori street-level bureaucracy dalam konteks pelayanan transportasi publik di wilayah perairan. Temuan menunjukkan bahwa diskresi aparaturnya bukan sekadar penyimpangan dari kebijakan formal, melainkan merupakan mekanisme kebijakan yang esensial dalam menghadapi ketidakpastian implementasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik dengan menempatkan non-program policy sebagai bagian dari praktik kebijakan adaptif, bukan sebagai kebijakan residual.

Implikasi teoretis lainnya adalah penguatan hubungan antara kebijakan adaptif dan implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan program dalam mengantisipasi dinamika lapangan mendorong munculnya kebijakan non-program sebagai bentuk adaptasi institusional yang belum sepenuhnya terlembaga. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan kebijakan program, non-program, dan diskresi aparaturnya dalam satu sistem kebijakan yang utuh.

5.2.4 Implikasi bagi Penelitian Lanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh mekanisme institusionalisasi kebijakan non-program dalam organisasi publik. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada perumusan model kebijakan adaptif yang mampu mengintegrasikan diskresi street-level bureaucracy ke dalam kebijakan formal tanpa mengurangi fleksibilitas implementasi.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan praktik non-program policy pada layanan penyeberangan di wilayah lain atau sektor transportasi publik yang berbeda. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman mengenai variasi praktik diskresi dan kapasitas adaptif organisasi dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ke depan juga dapat mengembangkan pendekatan metodologis campuran (mixed methods) untuk mengukur dampak kebijakan non-program secara lebih komprehensif, baik dari sisi efektivitas layanan, keselamatan pelayaran, maupun kepuasan pengguna jasa. Dengan demikian, kajian non-program policy tidak hanya berhenti pada deskripsi kualitatif, tetapi juga mampu memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan publik yang berkelanjutan.

